

PEMBANGUNAN DESA MIGRAN PRODUKTIF (DESMIGRATIF) DENGAN PENDEKATAN PERENCANAAN SECARA HOLISTIK, TEMANIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL

*DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE MIGRANT VILLAGES (DESMIGRATIVE) WITH A HOLISTIC,
THEMANIC, INTEGRATED AND SPATIAL PLANNING APPROACH*

Yeni Nuraeni

Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan

Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

yeninur@hotmail.com

ABSTRAK

Pembangunan Desa Migran Produktif (desmigratif) yang dipelopori oleh Kementerian Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Tenaga Migran Indonesia (PMI) serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya, dengan menawarkan 4 program utama yaitu pelayanan migrasi, *community parenting*, usaha produktif dan koperasi desmigratif. Keberhasilan pembangunan desmigratif sangat ditentukan oleh adanya koordinasi dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga maupun instansi pemerintah dan non pemerintah lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap desa-desa yang menjadi objek pembangunan desmigratif, setelah program desmigratif selesai dilaksanakan, ternyata masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa untuk implementasi 4 program pilar desmigratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi dalam pembangunan/pengembangan desmigratif dikaitkan dengan konsep penganggaran dan perencanaannya. Penelitiannya menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh dari lokasi survey di 5 desa yang dijadikan objek pembangunan desmigratif yang tersebar di 5 Provinsi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang terjadi disebabkan karena belum terimplementasinya koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan/pengembangan desmigratif. Kementerian Ketenagakerjaan perlu melakukan pendekatan terhadap K/L maupun instansi pemerintah dan non pemerintah lainnya serta menyusun langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan paradigma penganggaran money follow program dan pendekatan perencanaan secara Holistik-Tematik-Integratif – dan Spasial berdasarkan pada agenda pembangunan prioritas nasional RPJMN tahun 2020-2024.

Kata Kunci: Pembangunan desmigratif, *Money Follow Program*, Holistik-Tematik-Integratif-Spasial

ABSTRACT

The Development of Productive Migrant Villages (desmigrative) pioneered by the Ministry of Manpower is intended to provide protection for Indonesian Migrant Workers Candidates (CPMI) / Indonesian Migrant Workers (PMI) and improve the welfare of their families, by offering 4 main programs, namely migration services, community parenting, productive business, and desmigratif cooperatives. The success development of desmigratif is largely determined by the coordination and collaboration between Ministries / Agencies and other government and non-government agencies. Based on the results of the evaluation of the villages that are the object of productive migrant village development, it turns out that there are still many problems faced by the village government and the village community in order to be able to implement the 4 desmigrative pillar programs. This study aims to examine the problems that occur in desmigratif development associated with the concept of budgeting and planning. His research uses secondary data and primary data obtained from survey locations in 5 villages which are the objects of desmigratif development spread across 5 provinces. Data analysis was performed using qualitative methods. The results showed that the problems that occurred were due to the not yet implemented coordination and collaboration in the implementation of desmigratif development. The Ministry of Manpower needs to approach Ministries / Institutions as well as other government and non-government agencies and formulate strategic steps to implement the money follow program budgeting paradigm and a Holistic-Thematic-Integrative - and Spatial planning approach based on the 2020 RPJMN national priority development agenda. -2024.

Keywords: Desmigratif development, *Money Follow Program*, Holistic-Thematic-Integrative-Spatial

PENDAHULUAN

Pembangunan Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah salah satu upaya terobosan Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) di desa yang menjadi kantong-kantong PMI. Hal ini dilakukan dengan menawarkan program-program unggulan yang dibutuhkan oleh CPMI/PMI dan keluarganya melalui pemanfaatan potensi lokal dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah setempat. Pembangunan Desmigratif berlandaskan pada 4 program/pilar utamanya yaitu :

1. Pilar I : Desa akan menjadi pusat layanan informasi, komunikasi, yang merupakan bagian dari proses penempatan dan perlindungan sejak pra penempatan, hingga kembali ke daerah asal. Pertimbangannya adalah karena Pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat harus mampu memberikan informasi tentang cara menjadi PMI sesuai dengan prosedur yang berlaku, sejak pra, hingga kembali ke daerah asal dengan aman, cepat, mudah dan berbiaya murah.
2. Pilar II : Program desmigratif juga membidangi penciptaan usaha produktif melalui pelatihan usaha, pendampingan usaha serta bantuan sarana usaha produktif hingga pemasarannya. Melalui program tersebut diharapkan keluarga PMI mampu mengelola penghasilannya untuk menciptakan usaha-usaha produktif.
3. Pilar III : Program desmigratif juga mengembangkan *community parenting*, melalui pelatihan kepada masyarakat, orang tua dan suami/istri PMI yang tinggal di rumah tentang cara mengasuh, mendidik, membimbing dan membesarkan anak dengan benar dan tepat, agar mereka terus bisa bersekolah mengembangkan kreativitasnya.
4. Pilar IV : Program desmigratif dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan masyarakat dalam rangka penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dan kemudahan akses permodalan yang terorganisir dapat berbentuk koperasi usaha, *Baitul Mal Wat Thamwil* (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan bentuk

lembaga keuangan lainnya yang menjadi inisiatif bersama dari masyarakat dan didukung oleh pemerintah.

Secara garis besar maksud dari pembangunan dan pengembangan desmigratif adalah untuk menekan jumlah PMI non prosedural serta mewujudkan masyarakat yang produktif dan keluarga PMI yang sejahtera di desa asal PMI (*Pedoman Desa Migran Produktif*, 2017). Adapun tujuan dari pembangunan dan pengembangan desmigratif adalah sebagai berikut (*Pedoman Desa Migran Produktif*, 2017) :

- Menyediakan informasi ketenagakerjaan dan layanan migrasi di tingkat desa.
- Memberdayakan keluarga PMI dan PMI Purna beserta keluarganya.
- Mendorong peran aktif pemerintah desa pada desa asal PMI dan seluruh pemangku kepentingan.

Pembentukan Desmigratif diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terbaik dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada CPMI/PMI dan anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mencapai keberhasilan dari seluruh program Desmigratif kunci utamanya adalah terciptanya kerjasama, koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya sehingga program desmigratif merupakan sebuah program yang terpadu dan terintegrasi serta berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah, non pemerintah, LSM maupun masyarakat. Tanpa terjadinya kerjasama, koordinasi dan integrasi program, maka tujuan dari 4 pilar program desmigratif tidak mungkin tercapai.

Program Desmigratif sudah mulai diluncurkan sejak tahun 2016 melalui program pilot project di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, dilanjutkan tahun 2017 program desmigratif diluncurkan di 120 desa yang tersebar di 10 Provinsi. Selama 2 tahun pelaksanaan program Desmigratif yang menjadi kendala utama adalah terciptanya kerjasama dan koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya sehingga program Desmigratif bisa menjadi sebuah program yang benar-benar terpadu dan

terintegrasi lintas Kementerian/lembaga/ pemangku kepentingan sesuai dengan konsep awal. Pada kenyataannya masih banyak tujuan program desmigratif yang belum tercapai

karena belum adanya integrasi program tersebut. Konsep dari pembangunan Desmigratif yang dicanangkan Kementerian Ketenagakerjaan dapat dilihat pada gambar 1.

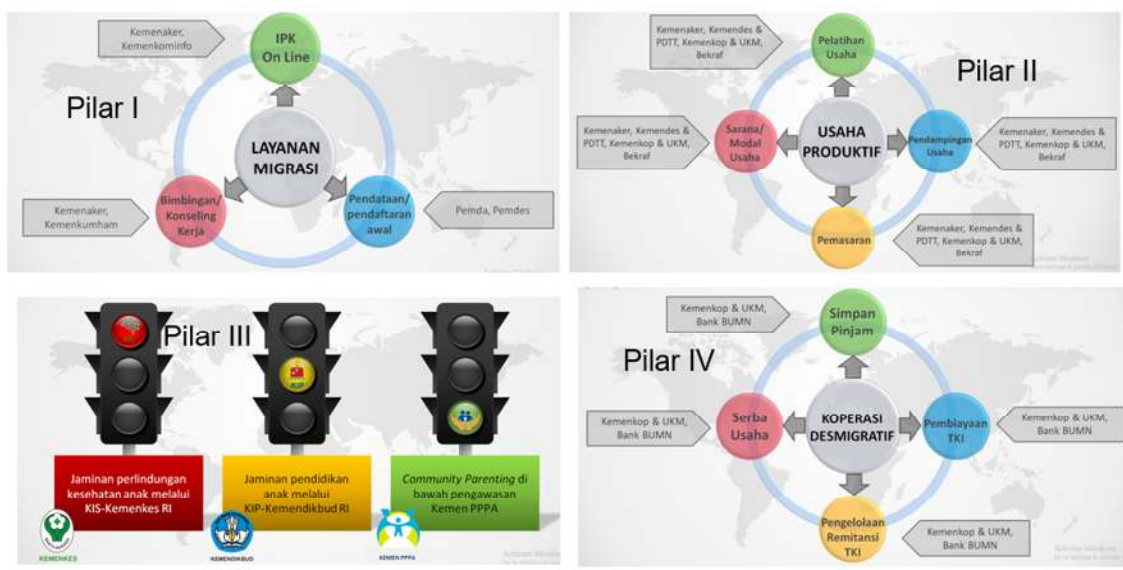


Gambar 1 : Konsep Pengembangan Desa Migran Produktif (Desmigratif)

Sumber : (Permenaker 2/2019, Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Di Desa Migran Produktif, 2019)

Konsep perencanaan awal untuk mengimplementasikan tujuan dari ke 4 pilar utama program desmigratif harus terjadi

kerjasama dan integrasi program lintas Kementerian lembaga/instansi terkait seperti terlihat pada gambar 2



Gambar 2 :Kerjasama, Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga

Sumber : (Membangun Dan Melindungi PMI Dari Desa, 2017)

Agar Program Desmigratif dapat terlaksana sesuai target dan tujuannya, diperlukan keterpaduan, sinergi dan integritas kewenangan dan hubungan kerja antar berbagai instansi pemerintah, baik antar Kementerian/Lembaga, antara Instansi Pusat dengan Daerah maupun antar Instansi Daerah serta dengan lembaga non pemerintah terkait lainnya. Keterpaduan, sinergitas dan integrasi ini sangat terkait dengan implementasi kebijakan yang menjadi sumber lahirnya kewenangan sektoral dan menjadi dasar mekanisme kerja antar instansi. Hal ini sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang menganut konsep *"Money Follow Program dan Pendekatan Perencanaan secara Holistik, Temanik, Integratif dan Spasial"*.

Untuk mengetahui sejauh mana program desmigratif dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan pada awal pembangunannya, maka dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengembangan desmigratif serta melihat kondisi yang terjadi setelah program pembangunan selesai dilaksanakan.

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui potensi-potensi desa kantong PMI yang menjadi obyek pembangunan/pengembangan desmigratif, melakukan evaluasi dan analisis terhadap pelaksana pembangunannya serta menyusun rekomendasi dan strategi untuk mewujudkan pengembangan program desmigratif secara terintegrasi dengan berdasarkan konsep *"Money Follow Program dan Pendekatan Perencanaan secara Holistik, Temanik, Integratif dan Spasial"*.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan dari sifatnya, penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian deskriptif di mana sifat penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta (Ishaq,2017) berkaitan dengan pembangunan/pengembangan desmigratif. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari

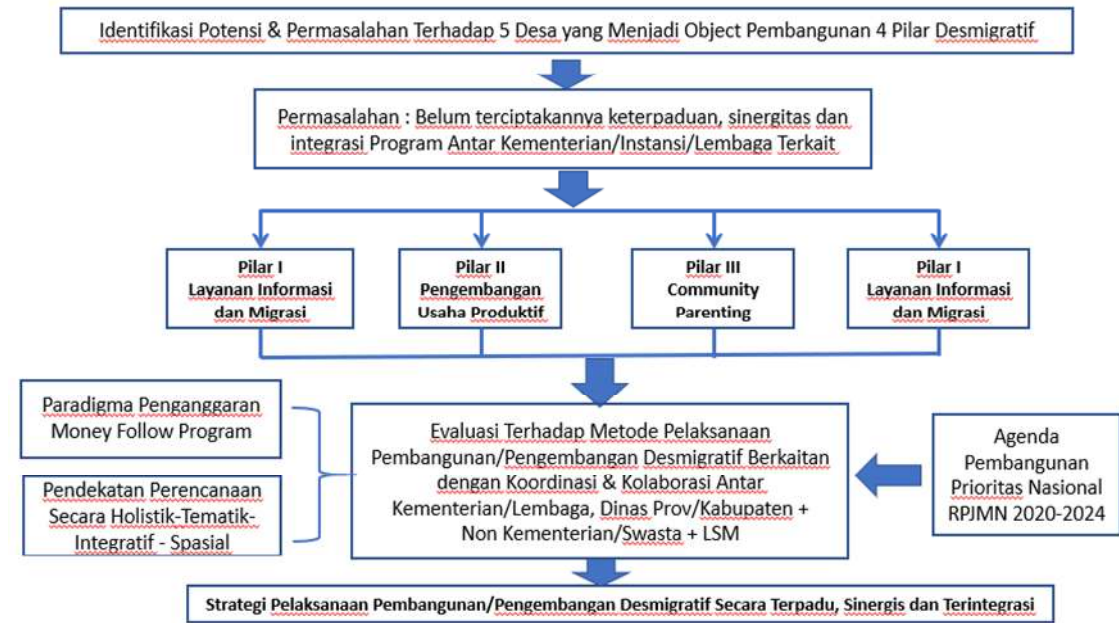
obyek yang diselidiki yaitu desa migran produktif di beberapa desa yang diambil sebagai sampel dengan metode purposive sampling. Kriteria pemilihan sampel berdasarkan penyebaran desa kantong PMI di 5 Provinsi yang mewakili dari segi budaya, potensi unggulan desa, ketersediaan sarana dan prasarana desa. Hasil penelitian akan digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang dan untuk merumuskan strategi perbaikan ke depannya.

Adapun dari segi bentuk, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian evaluatif yang dilakukan untuk menilai program pembangunan/pengembangan yang telah dijalankan (Ishaq,2017). Hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai input bagi perbaikan dan peningkatan program desmigratif ke depannya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan di 5 (lima) desa migran produktif yang terletak di Kabupaten-Kabupaten yang tergolong pada kantong PMI (daerah yang memiliki jumlah PMI yang cukup besar) serta tersebar di 5 (lima) Provinsi dari total 10 Provinsi. Pemilihan Provinsi berdasarkan pertimbangan keberadaan sampel yang dianggap representatif.

Data primer diperoleh dengan memberikan kuesioner dan wawancara mendalam kepada informan terpilih dari tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat, PMI Purna, Keluarga PMI, LSM, Pejabat K/L terkait, Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN yang bekerjasama dan perusahaan swasta.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Ishaq,2017). Alur pikir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar no 3.



Gambar 3 : Alur Pikir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Desa Objek Pembangunan/Pengembangan Desmigratif

a. Desa Brengkok Provinsi Jawa Timur

Sumber daya manusia perangkat Desa Brengkok mayoritas memiliki pendidikan yang relative tinggi, hanya 14,29% yang memiliki pendidikan di bawah SLTA. Pada umumnya kondisi pendidikan perangkat desa di lokasi desmigratif didominasi 50% lebih berpendidikan SLTA ke bawah. Kemampuan sumber daya manusia perangkat desa bisa menjadi salah satu faktor pendukung program desmigratif di mana pemerintah desa diharapkan dapat berperan aktif dalam peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan CPMI/PMI dengan menjadikan desa sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi, untuk pelaksanaan salah satu program desmigratif yaitu “Memberikan Informasi dan Layanan Migrasi” diperlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten.

Untuk mendukung salah satu program desmigratif berupa Memberikan Informasi ketenagakerjaan, pemerintah desa dapat menyediakan keseluruhan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Terdapat rumah yang dapat disewa untuk digunakan sebagai rumah belajar desa

desmigratif seluas 70 m² dengan jarak 50 meter dari balai desa.

Usaha yang sudah berjalan pada sebagian besar memiliki status belum berkembang. Melalui program desmigratif diharapkan dapat menumbuh kembangkan usaha produktif serta akan dapat menambah jumlah pengusaha maupun meningkatkan status usaha.

Lembaga desa yang diharapkan dapat diandalkan untuk membantu menggerakkan/memberdayakan masyarakat desa dalam berperan mendukung Program Desmigratif adalah LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa). Selain lembaga-lembaga desa tersebut di atas terdapat juga beberapa organisasi masyarakat seperti tim penggerak PKK dan Karang Taruna yang dapat diharapkan ikut berperan mendukung Program Desmigratif di mana kedua organisasi masyarakat tersebut di atas sudah terbiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa diantaranya yaitu; arisan Ibu-ibu, membantu pelaksanaan Posyandu, penghijauan lingkungan.

Terdapat beberapa kelompok usaha, lembaga ekonomi dan keuangan desa yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung program desmigratif antara lain :

- Kelompok usaha tani Anugerah I dan Kelompok usaha tani Anugerah II diharapkan dapat menggerakkan

masyarakat untuk dapat mengembangkan usaha produktif produk unggulan dari hasil pertanian desa melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan, teknik pengolahan, dan strategi pemasaran produk unggulan.

- Koperasi simpan pinjam desa diharapkan dapat memberikan bantuan dana pinjaman untuk mengembangkan usaha produktif.

Jenis usaha yang sudah dirintis oleh pelaku-pelaku usaha setempat berupa makanan dan mebel. Jenis-jenis usaha yang telah dirintis masih berpotensi untuk dikembangkan dengan syarat adanya perbaikan dari segi :

- Perbaharuan peralatan yang digunakan : menggunakan alat yang lebih canggih & modern.
- Perluasan usaha/perluasan kesempatan kerja : dengan mengajak ibu-ibu yang tidak bekerja atau bapak-bapak purna PMI yang tidak mempunyai usaha.
- Sistem pemasaran/luas wilayah pemasaran : bisa dipasarkan ke luar desa bahkan ke kabupaten Lamongan dengan menggunakan Pemasaran Online.
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia : dengan adanya Program pelatihan/bantuan/pinjaman dana : diadakannya pelatihan-pelatihan agar produk yang dihasilkan bisa lebih beragam (tidak satu jenis saja), bantuan pinjaman supaya bisa membeli alat-alat yang lebih modern guna memajukan usaha tersebut.

b. Desa Megonten Provinsi Jawa Tengah

Sumber daya manusia perangkat desa mayoritas memiliki pendidikan yang relative rendah, dikarenakan hanya memiliki pendidikan SLTA. Keterbatasan sumber daya manusia perangkat desa bisa menjadi salah satu kendala untuk dapat mendukung program desmigratif di mana pemerintah desa diharapkan dapat berperan aktif dalam peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan CPMI/PMI dengan menjadikan desa sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi.

Terdapat ruangan milik pemerintah desa yang dapat digunakan untuk rumah belajar desmigratif seluas 168m². Untuk mendukung salah satu program desmigratif berupa Memberikan Informasi ketenagakerjaan, pemerintah desa dapat menyediakan sebagian sarana dan prasarana serta sdm, dan bersedia

mengupayakan sarana/prasarana yang belum tersedia.

Dari berbagai jenis penerimaan desa dimungkinkan untuk disinergiskan dengan bantuan untuk Program Desmigratif dan terdapat sumber penerimaan lain yang dapat disinergiskan dengan bantuan untuk Program Desmigratif yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa.

Beberapa produk unggulan desa yang dapat dikembangkan menjadi produk usaha produktif antara lain; pisang, kacang hijau, pupuk organik, dan Pengolahan Roti/Kue. Lembaga desa/kelompok usaha, ekonomi dan keuangan desa, mitra lokal yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung program desmigratif antara lain :

- Kelompok usaha tani Gapoktan karya bersama diharapkan dapat menggerakkan masyarakat untuk dapat mengembangkan usaha produktif produk unggulan dari hasil pertanian desa melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan, strategi pemasaran produk unggulan yang ada di desa Megonten.
- Koperasi diharapkan dapat memberikan bantuan dana pinjaman untuk mengembangkan usaha produktif.
- LSM Dharmo Tirto diharapkan dapat mendukung kegiatan pertanian.

Untuk mendukung Program Desmigratif diperlukan peran aktif lembaga ekonomi maupun keuangan desa. Terdapat beberapa lembaga ekonomi dan keuangan desa yang diharapkan dapat mendukung program desmigratif antara lain; Koperasi simpan pinjam, koperasi Sendari, BUMDES Tirto Lestari.

c. Desa Jambenenggang Provinsi Jawa Barat

Sumber daya manusia perangkat desa mayoritas memiliki pendidikan yang relative tinggi, hanya 57,14% yang memiliki pendidikan di atas SLTA, 28,57% Diploma III, 14,29% S1.

Kondisi geografis desa yang sebagian besar memiliki topografi Daratan memiliki potensi untuk menghasilkan komoditi unggulan berupa hasil perkebunan/pertanian sekitar 32%, warung makan 19%, peternakan 5%, kerajinan 5%. Melihat kondisi geografis tersebut warga desa Jambenenggang banyak yang bertani hal ini sangat mendukung salah satu program desmigratif menumbuhkan usaha

produktif dengan memanfaatkan potensi lokal. di Desa Jambenenggang ini memiliki potensi alam yang sangat memadai, terlihat dari hasil perkebunan yang bisa menghasilkan singkong, pisang yang setiap tahun selalu panen.

Untuk mendukung salah satu program desmigratif berupa memberikan informasi ketenagakerjaan, pemerintah desa dapat menyediakan sebagian sarana dan prasarana serta sdm, dan bersedia mengupayakan sarana/prasarana yang belum tersedia. Terdapat ruangan milik pemerintah desa yang dapat digunakan untuk rumah belajar desmigratif seluas 8 x 6 m².

Produk unggulan desa yang dapat dikembangkan menjadi produk usaha produktif antara lain olahan dari singkong dan pisang. Petani yang menanam singkong, pisang dan hampir sepanjang tahun mereka panen, biasanya menjual singkong, pisang hanya dijual tanpa diolah karena mereka kurang mempunyai keterampilan. Dengan adanya program Desmigratif, petani berharap bisa mengolah hasil pertanian dan memproduksi serta memasarkan keluar kabupaten Sukabumi.

Lembaga desa/kelompok usaha, ekonomi dan keuangan desa, mitra lokal yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung program desmigratif antara lain :

- Teras BRI diharapkan dapat memberikan bantuan dana pinjaman untuk mengembangkan usaha produktif.
- LSM/Lembaga dalam hal ini APWI diharapkan dapat mendukung kegiatan *community parenting* melalui kegiatan konseling keluarga, pendidikan *parenting* dan pembentukan koperasi desmigratif.

Sektor pekerjaan PMI aktif masih didominasi di sektor informal, masih tingginya PMI di sektor formal walaupun kebijakan penutupan PMI PLRT di negara Timur Tengah sudah berlaku dapat disebabkan adanya pengiriman PMI melalui jalur ilegal. Jenis pekerjaan PMI aktif masih didominasi PLRT hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki PMI sehingga sulit untuk mendapat kesempatan kerja selain sebagai PLRT.

d. Desa Namosain & Naimata Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk mendukung salah satu program desmigratif berupa *community parenting*,

pemerintah desa & mitra terkait dapat menyediakan "rumah belajar" dengan memanfaatkan berbagai prasarana pendidikan dan olahraga yang ada. Ketersediaan prasarana ekonomi di desa yang dapat dimanfaatkan/dikondisikan untuk mendukung program desmigratif menumbuh-kembangkan usaha produktif antara lain berupa; objek wisata pantai yang juga digunakan sebagai pelabuhan ikan; pasar semi permanen; pasar tanpa bangunan.

Beberapa produk unggulan desa yang dapat dikembangkan menjadi produk usaha produktif antara lain; perikanan, makanan ringan, bumbu dapur, pariwisata, kain tenun ikat. Lembaga desa/kelompok usaha, ekonomi dan keuangan desa, mitra lokal yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung program desmigratif antara lain :

- Kelompok usaha nelayan perikanan tangkap diharapkan dapat menggerakkan masyarakat terutama keluarga para PMI yang sedang bekerja di luar negeri untuk dapat mengembangkan usaha produktif produk unggulan dari hasil perikanan tangkap Kelurahan Namosain melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan, strategi pemasaran dan pendampingan usaha;
- Bank BRI dan Bank NTT diharapkan dapat memberikan bantuan dana pinjaman untuk mengembangkan usaha produktif ataupun memulai usaha baru;
- KUD Minakarota diharapkan dapat mendukung pengembangan koperasi dan pembentukan koperasi baru yang dapat meningkatkan SDM Kelurahan Namosain;
- LSM seperti Yayasan Attin, Yayasan Compation 721 (PPA), dan Yayasan Compation 629 (PPA) diharapkan dapat mendukung kegiatan *community parenting* melalui kegiatan konseling keluarga, pendidikan parenting dan lain sebagainya;
- Kelompok PKK kelurahan Namosain diharapkan dapat mendukung kegiatan pendidikan parenting, pembinaan kesehatan ibu dan anak, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan membuat tenun ikat.
- Kelompok usaha tani bapak dan kelompok tani ibu-ibu diharapkan dapat menggerakkan masyarakat untuk dapat mengembangkan usaha produktif produk unggulan dari hasil pertanian desa melalui

- kegiatan pelatihan kewirausahaan, strategi pemasaran dan kemasan produk.
- Bank pembangunan desa diharapkan dapat memberikan bantuan dana pinjaman untuk mengembangkan usaha produktif.
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diharapkan dapat mendukung kegiatan *community parenting* melalui kegiatan konseling keluarga, pendidikan parenting.

e. Desa Genggeling Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber daya manusia perangkat desa mayoritas memiliki pendidikan yang relative tinggi sekitar 62,50% yang memiliki pendidikan di atas SLTA.

Terdapat ruangan milik pemerintah desa yang dapat digunakan untuk rumah belajar desmigratif seluas 7x6m² (3 kamar) dengan kondisi baik. Lokasi desa terhadap pusat-pusat pemerintahan/pusat ekonomi dan perdagangan relative dekat dan akses relatif mudah (sarana transportasi dan jalan yang memadai), kondisi ini dapat mendukung prospek pemasaran produk-produk unggulan. Ketersediaan prasarana ekonomi di desa yang dapat dimanfaatkan/dikondisikan untuk mendukung program desmigratif "menumbuh kembangkan usaha produktif" antara lain berupa; Usaha mikro kecil, Obyek Pariwisata, Toko/warung kelontong, Pasar dengan bangunan permanen, Warung/kedai makanan minuman. Produk unggulan desa yang dapat dikembangkan menjadi produk usaha produktif antara lain; kopi, pisang, abon ikan.

Lembaga desa/kelompok usaha, ekonomi dan keuangan desa, mitra lokal yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung program desmigratif antara lain :

- Kelompok usaha tani Abc diharapkan dapat menggerakkan masyarakat untuk dapat mengembangkan usaha produktif produk unggulan dari hasil pertanian desa melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan, strategi pemasaran masih pemasaran tingkat lokal.
- Bank pembangunan desa diharapkan dapat memberikan bantuan dana pinjaman untuk mengembangkan usaha produktif.
- LSM/BPD diharapkan dapat mendukung kegiatan *community parenting* melalui kegiatan konseling keluarga, pendidikan parenting.

- Suami yang mengasuh anaknya karena ibunya menjadi Tenaga Kerja wanita di Luar Negeri.

Jumlah PMI purna yang memiliki kemampuan dan minat untuk mengembangkan usaha masih relatif kecil, adapun jenis usaha yang paling banyak adalah berupa nelayan, peternakan/perikanan hal ini sesuai dengan kondisi sumber daya alam.

Permasalahan Pengembangan Desa Migran Produktif

Berdasarkan hasil pengumpulan data primer dan data sekunder dari 5 (lima) lokasi desmigratif yang diambil sebagai sampel, maka dapat disimpulkan terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan di desa-desa tersebut berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan Program Desmigratif berdasarkan 4 pilar utamanya yaitu :

a. Pilar I : Layanan Migrasi

- Sumber Daya Manusia yang dipersiapkan untuk memberikan pelayanan informasi memiliki pendidikan yang relatif rendah yaitu sebagian besar hanya lulusan SLTA.
- Sulitnya warga desa dalam mendapatkan informasi dan layanan ketenagakerjaan mengingat lokasi dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota cukup atau relatif jauh dari lokasi desa.
- Sarana internet belum terpasang di tempat pusat layanan migrasi karena tidak ada bantuan dari lembaga terkait dan pemerintah desa belum memiliki anggaran untuk menyediakan sarana internet sehingga aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas layanan migrasi belum bisa digunakan oleh petugas layanan migrasi.
- Petugas layanan migrasi sebelum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemnaker tidak memahami secara jelas tugas dan wewenangnya sehingga belum bergerak untuk melaksanakan tugasnya seperti melakukan pendataan rumah tangga PMI. Setelah mengikuti pelatihan petugas layanan migrasi baru memahami apa yang menjadi tugasnya.

- Kendala yang dihadapi oleh petugas layanan migrasi adalah kurangnya respon dari masyarakat terhadap layanan yang diberikan, bahkan ada yang menolak untuk dilakukan pendataan dan meminta imbalan untuk bersedia memberikan informasi kepada petugas layanan migrasi.

b. Pilar II : Usaha Produktif

- Belum adanya pembinaan dan pelatihan oleh perangkat daerah kepada warga desa dalam penciptaan dan mengembangkan usaha produktif berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki desa.
- Keterbatasan warga desa dalam menentukan dan melaksanakan strategi pemasaran produk usaha produktif.
- Belum ada kemasakan untuk produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan jaringan pemasaran. Sehingga diperlukan pelatihan untuk masyarakat untuk dapat inovasi dalam pengemasan produk yang akan dipasarkan.
- Belum ada ketersediaan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat, usaha produktif, ekonomi, keuangan dan mitra lokal dalam mendukung program desmigratif, sehingga diperlukan peran serta pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan lembaga dimaksud.
- Kendala yang dihadapi adalah belum terdapat bantuan peralatan yang lebih modern untuk proses produksi pengolahan makanan hasil pertanian dan perikanan maupun peratan lainnya. Misalnya belum adanya alat pengering pertanian (hasil panen), para nelayan karena selama ini masih menggunakan kapal sederhana.
- Sarana transportasi umum masih kurang memadai, sehingga kondisi ini kurang dapat mendukung pemasaran produk-produk unggulan berupa hasil ikan tangkap yang tidak hanya dijual di daerah setempat, namun juga dipasarkan ke wilayah-wilayah lainnya.
- Keterbatasan potensi unggulan daerah dan keterbatasan inovasi, kreatifitas warga desa, dan alat pengolahan dalam mengembangkan usaha produktif.
- Terbatasnya modal.

- Belum teralokasinya anggaran/dana untuk mendukung program desmigratif yang bersumber dari daerah/desa.
- Semua PMI purna menggunakan uang hasil bekerja di luar negeri hanya untuk kebutuhan konsumtif bukan untuk membangun usaha produktif. Dengan adanya program desmigratif diharapkan kedepannya lebih banyak lagi PMI purna yang memiliki minat dan kemampuan untuk mengembangkan usaha produktif yang sesuai dengan potensi lokal.
- Belum adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta yang dimaksudkan untuk memberi keterampilan kepada PMI purna sehingga memiliki kemampuan untuk mendirikan/mengembangkan jenis usaha yang sesuai dengan potensi setempat. Dengan adanya program desmigratif diharapkan semua PMI purna bisa mengikuti pelatihan dimana jenis pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan kegiatan desmigratif menumbuhkan-kembangkan usaha produktif.

c. Pilar III : Community Parenting

- Belum adanya tenaga khusus untuk melaksanakan program *community parenting*.
- Sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan komunity parenting belum tersedia khususnya rumah belajar, walaupun sudah ada kerjasama dengan bank BNI tapi belum ada progress. Adapun kendala dengan pihak BNI adalah pihak pemerintah kelurahan tidak memiliki dana untuk membuat desain dan perhitungan RAB renovasi rumah belajar yang diminta BNI, sehingga saat ini belum ada kelanjutan/progress bantuan BNI untuk renovasi rumah belajar.

d. Pilar IV : Koperasi Desmigratif

- Belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan perangkat daerah kepada pengurus koperasi dalam pengelolaan lembaga koperasi.

- Belum maksimalnya peranan koperasi/ lembaga keuangan dalam pemberian bantuan usaha berupa kredit usaha rakyat kepada warga desa yang ingin mengembangkan usaha produktif.

Alternatif Solusi Untuk Mengatasi Permasalahan Pengembangan Desmigratif

Untuk dapat mengimplemtasikan 4 pilar utama pengembangan desmigratif, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat desa seperti diuraikan di atas, yaitu:

- Berkaitan dengan dengan terbatasnya kualitas SDM maka diperlukan untuk menambah personil dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia/perangkat daerah dalam mendukung program desmigratif.
- Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara optimal khususnya untuk dapat memberikan layanan informasi migrasi, petugas layanan perlu dapat mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan sehingga pemasangan jaringan internet perlu dilakukan secepat mungkin. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu dicarikan jalan keluar masalah kesediaan dana untuk pemasangan jaringan internet.
- Mendekatkan fungsi pelayanan informasi ketenagakerjaan dan target lokasi pemasaran produk usaha produktif sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana berupa ruang untuk mendukung program desmigratif.
- Peningkatan ketrampilan lainnya selain pertanian/perkebunan, Pelatihan kewirausahaan (Bisnis), pelatihan Pengelolaan Keuangan serta pelatihan Packaging dan Pemasaran.
- Bantuan yang diharapkan untuk mendukung usaha produktif adalah bantuan peralatan yang lebih modern dan bantuan biaya dan proses pengurusan lebel halal dari badan POM sehingga hasil produksi dapat dipasarkan secara lebih luas.
- Perlu penambahan kapal nelayan dengan GT yang lebih besar agar dapat menjangkau wilayah laut yang lebih jauh

lagi serta menyediakan alat produk yang lebih modern untuk menunjang pengembangan usaha produktif.

- Memaksimalkan potensi unggulan daerah yang dimiliki dan membuat inovasi dan meningkatkan peranan koperasi dalam pemberian bantuan kredit usaha rakyat untuk mengembangkan usaha produktif.
- PMI purna yang sudah mempunyai usaha butuh pelatihan manajemen dan pendampingan sehingga bisa lebih mengembangkan usahanya.
- Penyediaan dana desa yang bisa disinergiskan dengan program desmigratif yaitu dana pemberdayaan yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi.
- Mengajukan permohonan alokasi anggaran untuk program desmigratif yang bersumber dari pemerintah pusat / kemnaker.
- Koperasi yang ada sekarang baru terbatas pada koperasi simpan pinjam khusus untuk kelompok nelayan. Maka perlu dibentuk koperasi untuk kelompok-kelompok usaha lainnya dan juga lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya yang berbadan hukum.
- Salah satu kegiatan program desmigratif adalah memfasilitasi pembentukan dan pengembangan koperasi/lembaga keuangan untuk memperkuat usaha-usaha produktif masyarakat untuk jangka panjang dan berkelanjutan serta memudahkan akses untuk mendapatkan permodalan dari lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan ketergantungan terhadap bantuan sosial akan semakin berkurang.
- Mengajak masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembentukan dan pengembangan lembaga yang sudah ada maupun yang belum terbentuk dalam mendukung program desmigratif.
- Masyarakat perlu mendapatkan pengarahan dan motivasi tentang program-program desmigratif secara lebih mendalam sehingga mereka lebih paham manfaat dari program desmigratif dan tidak melakukan menolakan ketika petugas melakukan pendataan maupun memberikan informasi.
- Perlu peran serta pemerintah pusat dan daerah dalam mendamping penduduk desa agar dapat kreatif dan produktif untuk mengolah sumber daya yang dimiliki desa.
- Mendorong pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Tujuan

pembentukan LPM adalah sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat serta menumbuhkembangkan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah, untuk terciptanya partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat sehingga terciptanya kemandirian masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan.

Untuk pelaksanaan pilar 3 maka perlu dilakukan koordinasi secara intensif antara Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, Pihak Kelurahan dan pihak BNI sehingga penentuan lokasi dan renovasi rumah belajar segera dapat dilaksanakan secepatnya.

Strategi Pelaksanaan Desmigratif dengan Konsep *Money Follow Program* dan Pendekatan Perencanaan secara Holistik, Temanik, Integratif dan Spasial

Dalam pelaksanaan program desmigratif belum terlihat implementasi kerja sama, koordinasi, sinergitas dan integrasi program lintas Kementerian/DinasProvinsi/Dinas

Kabupaten maupun lembaga-lembaga terkait lainnya baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah, belum terdapat rencana keberlanjutan pelaksanaan program-program desmigratif (4 pilar) secara sinergis, terpadu, dan terintegrasi. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rangka mengimplementasikan 4 pilar utama desmigratif, Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa bekerja sendirian. Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka mewujudkan Pendekatan Pembangunan Desmigratif secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial adalah dengan melakukan MOU dengan K/L terkait sejak tahun 2017, tetapi implementasinya belum banyak yang dapat terealisasi, sehingga masih banyak terjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa dalam rangka mewujudkan 4 pilar Desmigratif. MOU yang telah dilakukan oleh Kemnaker dengan K/L terkait dapat dilihat pada tabel 1.

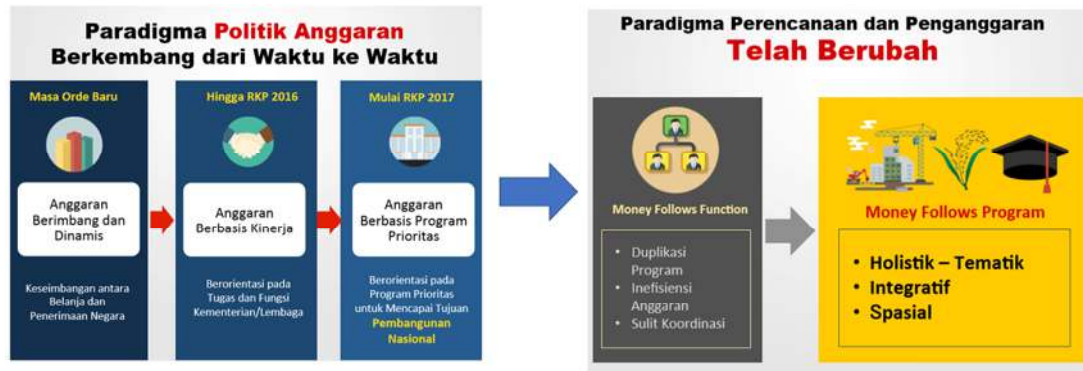
Tabel 1 : MOU yang Telah Dilakukan Oleh Kementerian Ketenagakerjaan Dalam Rangka Sinergitas Program Desmigratif Dengan Kementerian/Lembaga Terkait

[illegible]

Aksi nyata pelaksanaan program secara sinergis, terpadu dan terintegrasi belum terlihat jelas. Oleh karena itu perlu disusun suatu strategi dan rekomendasi optimalisasi program Desmigratif melalui peningkatan peran Stakeholder.

Sejalan dengan paradigma politik anggaran dan paradigma perencanaan dan penganggaran

yang sudah berubah dari waktu-waktu ke waktu, program pembangunan dan pengembangan desmigratif pun harus diupayakan untuk mengikutinya. Perubahan paradigma perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4 : Konsep Perencanaan dan Penganggaran Money Follows Program dengan Pendekatan Pembangunan Secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial

Sumber : (*Money Follows Program, Prinsip Baru Untuk Prioritas Nasional 2017, 2017*)

Pada bulan Februari 2016, Presiden Joko Widodo mencanangkan untuk meninggalkan paradigma lama dalam sistem penganggaran yaitu “*money follows function*” dan menggunakan paradigma baru yaitu “*money follows program*”, hal ini dimaksudkan untuk dapat membiayai program-program prioritas pemerintah pusat dan daerah serta untuk efisiensi anggaran (Wasono & Muhammad, 2018). Adapun alasan utama penggantian paradigma *money follows function* tersebut adalah sebagai berikut (Novia, 2020);

1. Dalam paradigma *money follows function*, mengharuskan untuk mendanai fungsi-fungsi pemerintah walaupun bukan termasuk program-program prioritas nasional, hal ini dianggap akan mengakibatkan inefisiensi dalam penganggaran.
2. Dengan paradigma *money follows function*, program/kegiatan akan dijalankan sendiri-sendiri oleh K/L dan tidak terkoordinasi satu sama lain, hal ini yang menjadi penyebab utama lemahnya koordinasi yang terjadi diantara sektor-sektor pembangunan di Indonesia.

Sedangkan dalam konsep *money follow program* ditegaskan bahwa perlunya pendekatan penganggaran yang berdasarkan

pada bobot program/kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana program/kegiatan dikatakan memiliki bobot yang tinggi jika memberi manfaat yang besar kepada rakyat. Kelebihan dari paradigma *money follows program* yaitu menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan pembobotan terhadap tingginya suatu program/kegiatan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perbaikan dalam sistem penganggaran sebagai berikut (Hendra, 2016);

1. Program-program yang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat akan mendapat prioritas dan alokasi anggaran yang tinggi.
2. Memberikan kejelasan dan ketegasan dari program dan kegiatan yang akan didanai sehingga pencapaian sasaran akan lebih optimal dan teratur.
3. Melalui koordinasi yang jelas antar program dan kegiatan akan dapat mendorong terciptanya efisiensi.

Perbedaan antara pendekatan kedua sistem penganggaran tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2: Perbedaan Pendekatan Money Follow Fuction dan Money Follow Program

No	Uraian	<i>Money Follow Fuction</i>	<i>Money Follow Program</i>
1	Perencanaan Alokasi	Dimulai dari identifikasi unit K/L, yaitu : pelaksanaan fungsi dan dukungan pada prioritas	Dimulai dari penentuan program prioritas untuk diturunkan pada unit K/L yang terkait
2	Realokasi Anggaran	Kaku karena sekat organisasi dengan ssarannya masing- masing	Lebih mudah dilakukan karena diarahkan untuk pencapaian sasaran program
3	Pelaksanaan Anggaran	Penganggung jawab ada dimasing-masing unit dan berpotensi tidak terintegrasi satu sama lainnya (kebijakan, spasial maupun urutan pembangunan)	Kebijakan lebih mudah diintegrasikan karena kontrol pada program prioritas Dapat ditunjuk penanggung jawab kegiatan yang bersifat lintas unit

Sumber : (Ningsih, 2018)

Untuk dapat merumuskan program-program kegiatan menjadi lebih relevan, efektif dan efisien serta diharapkan akan berujung dengan lahirnya program dan kegiatan berkualitas, maka pelaksanaan anggaran berbasis kinerja perlu berfokus pada konsep *money follows program* (Muhammad, 2018).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Pusat maupun daerah secara holistik, terintegrasi, tematik, dan spasial harus didukung dengan paradigma penganggaran *money follows program* dengan melakukan pengamanan terhadap alokasi program prioritas, serta melakukan relokasi kegiatan yang pelaksanaannya telah cukup dan melakukan efisiensi terhadap program yang non prioritas (DIY, 2016).

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan penyusunan Anggaran yang menekankan pada Program Prioritas yang Holistik-Tematik, Terintegrasi dan Spasial adalah;

- Pendekatan **HOLISTIK-TEMATIK**, yaitu pencapaian sasaran prioritas dari satuan kerja/unit kerja lain harus berkoordinasi dengan multi satuan kerja/unit kerja (Anonymous, 2018). Contoh implementasi dalam pembangunan/pengembangan desmigratif misalnya diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara K/L terkait maupun koordinasi muti OPD/SKPD terkait seperti konsep awal pembangunan desmigratif untuk setiap pilarnya.

- Pendekatan **INTEGRATIF**, yaitu pembangunan harus dilakukan secara **integratif** (Anonymous, 2018). Implementasi dalam desmigratif, sasaran prioritas untuk pengembangan desmigratif perlu dilakukan secara terintegrasi melalui Pembangunan Infrastruktur TIK untuk layanan migrasi, perbaikan jalan untuk memudahkan akses ke pusat-pusat layanan dan perekonomian desa, penyiapan prasarana dan sarana untuk layanan migrasi, *community parenting*, pengembangan usaha produktif dan pengembangan koperasi, serta pembinaan, pelatihan, pendampingan, pengawasan dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam menjadi produk unggulan serta pemasarannya dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).

- Pendekatan **SPASIAL**, yakni pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan lokasi yang terintegrasi dengan infrastruktur lainnya (Anonymous, 2018). Contohnya, pembangunan infrastruktur TIK dan jalan di lokasi desmigratif harus mempertimbangkan lokasi pemukiman terintegrasi dengan sarana pendukung, pembangunan fasilitas pendukung untuk membangun ekonomi masyarakat/pasar, serta pemanfaatan jaringan air dan listrik yang telah sesuai dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah yang telah memiliki legalitas formal.
Konsep penganggaran Money Follow Program dan pendekatan perencanaan

Holistik-Tematik-Integratif dan Spasial dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5 : Konsep Perencanaan Dengan Pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial
Sumber : (Andy, 2018)

Dengan menggunakan paradigma penganggaran *Money Follow Program* dan pendekatan perencanaan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial, pembangunan/pengembangan desmigratif ke depannya harus memperhatikan agenda Pembangunan Prioritas Nasional Dalam RPJMN 2020-2024, sehingga Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pelopor dalam pembangunan

desmigratif dapat menyusun rencana strategis untuk mengimplemtasikan koordinasi dan kolaborasi dengan K/L terkait.

Pembangunan/pengembangan desmigratif telah sesuai dengan agenda pembangunan prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 khususnya Prioritas Nasional I, II, dan III seperti terlihat pada gambar 6.



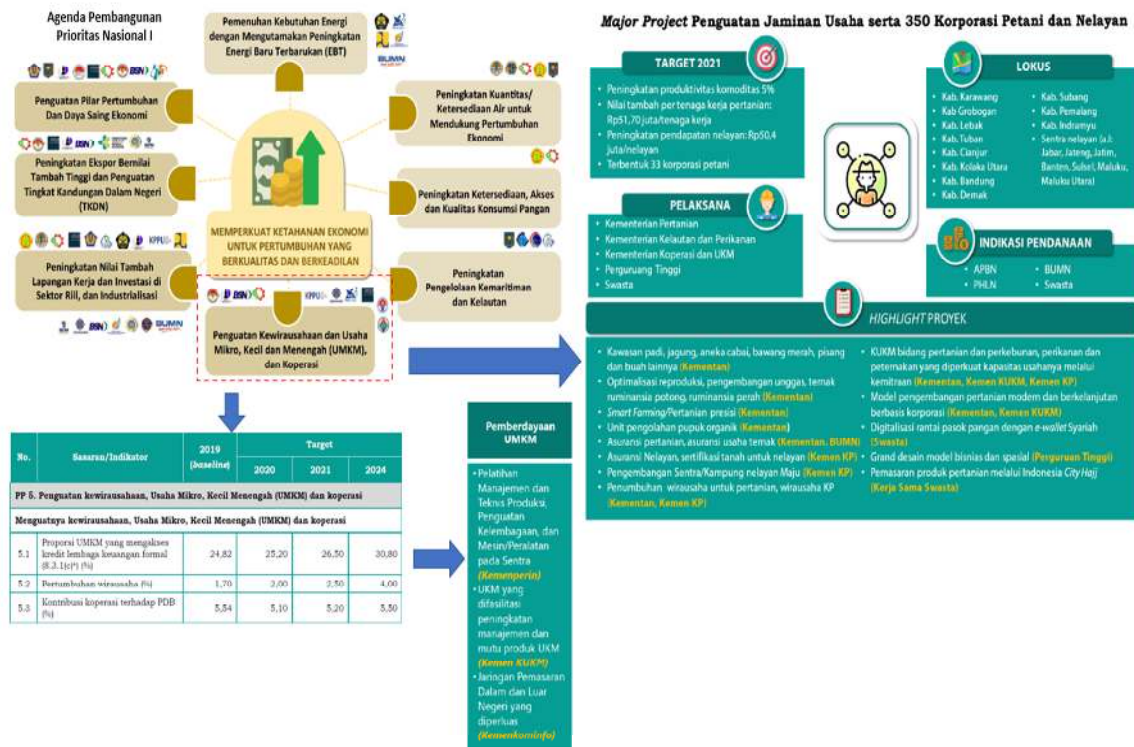
Gambar 6 : Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 Terkait dengan Pembangunan/Pengembangan Desmigratif
Sumber : (Bappenas, 2019)

Agenda Pembangunan Prioritas Nasional I yang terkait langsung dengan

pembangunan/pengembangan desmigratif adalah arah kebijakan dalam rangka

peningkatan nilai tambah ekonomi yang mencakup penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; (2)

meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi (Bappenas, 2019), seperti terlihat pada gambar 7.



Gambar 7 : Agenda Pembangunan Prioritas Nasional I Dalam RPJMN 2020-2024 Terkait Dengan Pembangunan/Pengembangan Desmigratif
Sumber : (Dr. Velix, 2020) diolah

Agenda Pembangunan Prioritas Nasional II yang terkait langsung dengan pembangunan/pengembangan desmigratif adalah; strategi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan: pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan jasa lainnya, strategi pemerataan melalui pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan Kawasan Perdesaan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan secara terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi/kawasan strategis di sekitarnya (Bappenas, 2019)

Agenda Pembangunan Prioritas Nasional III yang terkait langsung dengan pembangunan/pengembangan desmigratif adalah (Bappenas, 2019);

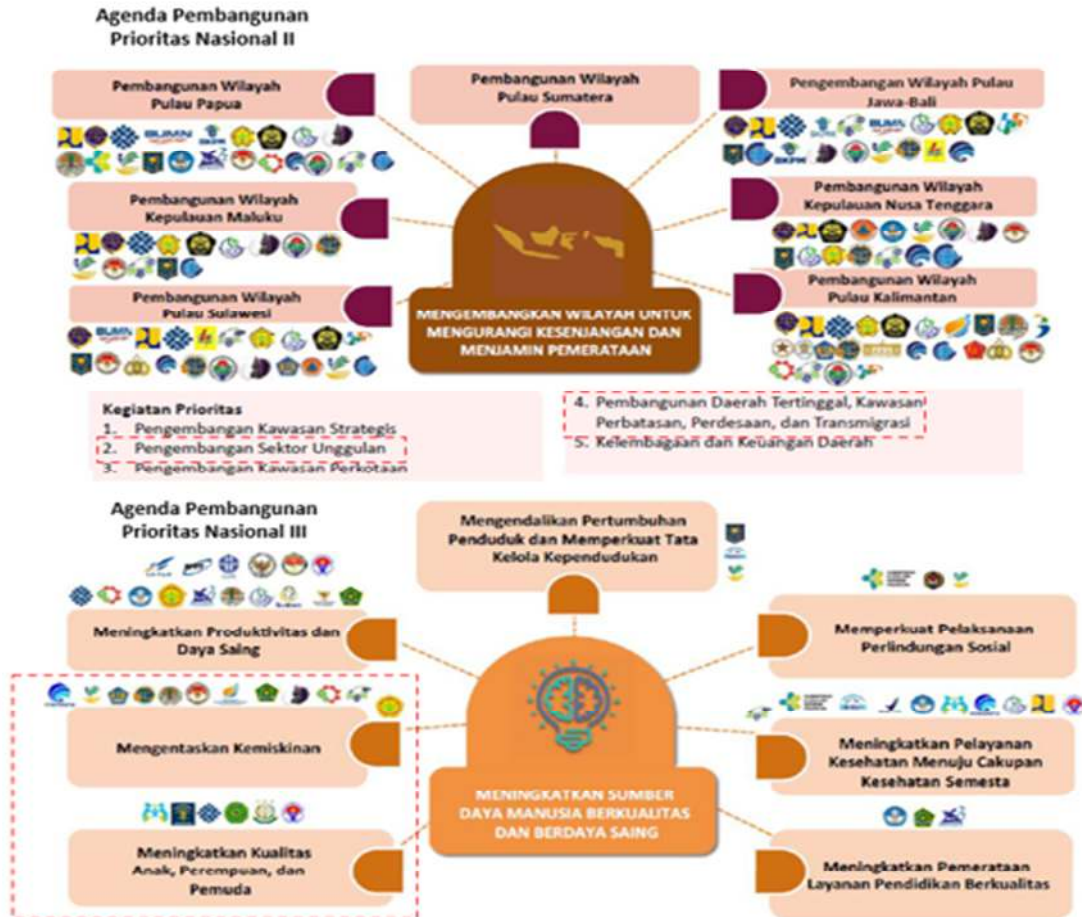
- peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
- Peningkatan kualitas pemuda.
- Akselerasi penguatan ekonomi keluargamencakup; pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan, fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha produktif dan akses

pendanaan lanjutan bagi usaha produktif dari kelompok miskin dan rentan.

- Keperantaraan usaha dan dampak sosial, mencakup ; penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan dengan skema pembinaan usaha serta menghubungkan

dengan mitra usaha strategis, dan pengembangan skema pendanaan program ekonomi produktif yang berdampak sosial.

Agenda Pembangunan prioritas nasional II dan III terkait pembangunan/pengembangan desmigratif bisa dilihat pada gambar 8.

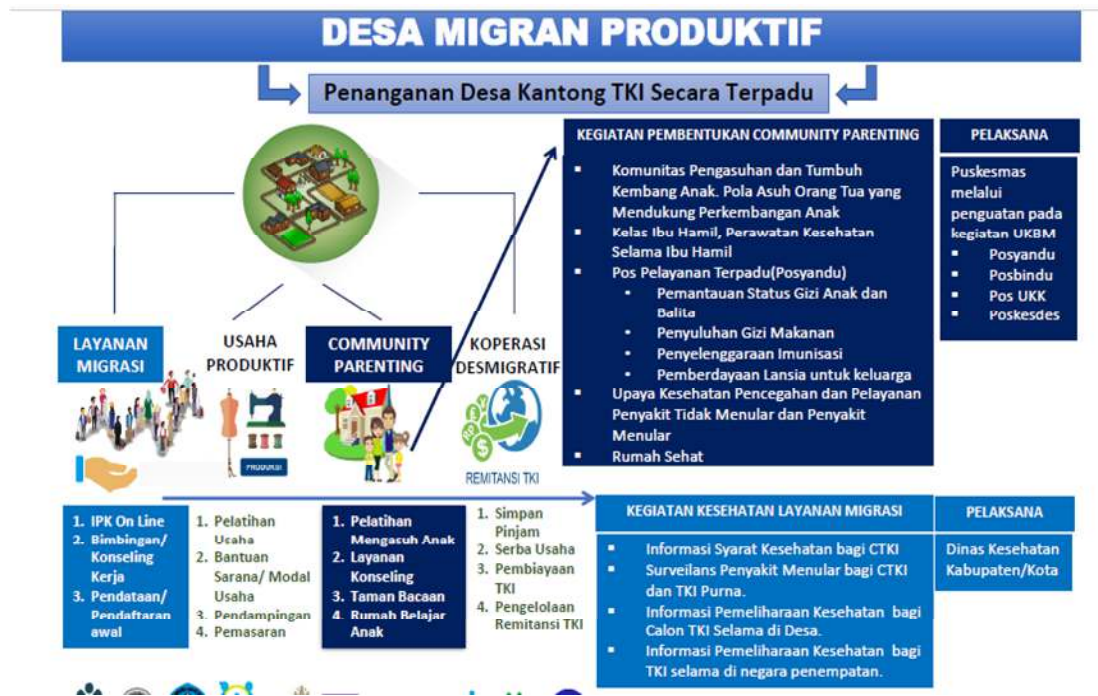


**Gambar 8 : Agenda Pembangunan Prioritas Nasional II & III Dalam RPJMN 2020-2024
Terkait Dengan Pembangunan/Pengembangan Desmigratif**

Sumber : (Dr. Velix, 2020)diolah

Untuk dapat memaksimalkan pembangunan/pengembangan desmigratif, maka koordinasi dengan K/L dan OPD/SKPD terkait sesuai dengan Agenda Pembangunan Prioritas Nasional. Kementerian Ketenagakerjaan perlu lebih intensif melakukan pendekatan dan merumuskan strategi untuk mengimplementasikan

perencanaan pembangunan/pengembangan desmigratif dengan konsep Holistik-Tematik-Integratif-Spasial. Contoh sukses seperti yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam mengintegrasikan program kegiatannya dengan program pembangunan desmigratif pada tahun 2018 seperti terlihat pada gambar 9.



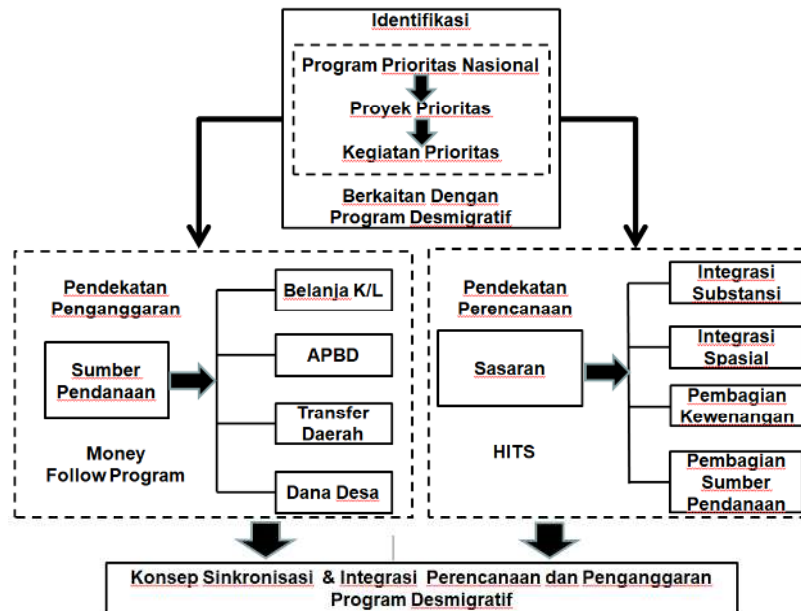
Gambar 8 : Pelaksanaan Pembangunan Desmigratif Kolaborasi dan Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan
Sumber : (Kemenkes, 2018)

KESIMPULAN& SARAN

Pembangunan desmigratif sudah sesuai dengan agenda pembangunan prioritas nasional pada RPJMN 2020-2024 dan konsep pembangunan awal yang dicanangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan konsep penganggaran *Money Follow Program* dan Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik-Integratif-Spasial yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016. Permasalahan masih terjadi pada proses pembangunan/pengembangan desmigratif yang disebabkan implementasi koordinasi dan kolaborasi dengan K/L dan

OPD/SKPD terkait belum terealisasi secara optimal walaupun MOU sudah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Untuk memaksimalkan koordinasi dan kolaborasi dalam pembangunan/pengembangan desmigratif perlu dirumuskan strategi mulai dari identifikasi agenda pembangunan prioritas nasional terkait dengan desmigratif serta dilakukan pendekatan terhadap K/L dan OPD/SKPD terkait yang menjadi pelaksananya. Strategi untuk merumuskan konsep sinkronisasi dan integrasi penganggaran dan perencanaan program desmigratif dapat dilihat pada gambar 9.



Gambar 9 : Tahapan Untuk Melakukan Sinkronisasi dan Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Program Desmigratif sesuai dengan Agenda Pembangunan Prioritas Nasional

Karena keterbatasan lingkup penelitian yang telah dilakukan, maka ke depan perlu dilanjutkan dengan penelitian yang lebih mendalam berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- Merumuskan program-program dari 10 kementerian (Kemnaker, Kemendes, Kemendikbud, Kemenkes, BUMN RI, Kemen PPPA, Kementerian Koperasi dan UKM, BEKRAF, Kemenkumham, Kemenkominfo) dan lembaga-lembaga terkait lainnya (Dinas Provinsi/Kabupaten dari 10 kementerian, Swasta, LSM) yang

dapat dipadukan, disinergiskan dan diintegrasikan dengan program desmigratif (layanan migrasi, usaha produktif, community parenting, koperasi desmigratif).

- Penyusunan rencana strategis untuk keberlanjutan program desmigratif secara sinergis, terpadu dan terintegrasi melalui koordinasi dan kerjasama antar 10 Kementerian dan instansi/lembaga terkait lainnya.

Saran penelitian lanjutan dapat dilihat pada gambar 11.



Gambar 11 : Penelitian Lanjutan Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Desmigratif Secara Terpadu, Sinergis dan Terintegrasi serta Berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Andy, K. (2018). *Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Daerah*. LKP3.
- Anonymous. (2018). *Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis Money Follow Program Di Provinsi Sumatera Utara*.
- Bappenas. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- DIY, D. (2016). *Konsultasikan Money Follow Program ke Kemendagri*. 2016.
- Ishaq, (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta.
- Velix, V. W. S. M. (2020). *Kebijakan Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2021 dan Penjabarannya di Daerah*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Hendra, K. K. . (2016). Money Follow Function Dan Money Follow Program. *Warta Anggaran*, 9–12.
- Kemenkes. (2018). *Pendekatan Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2018*.
- Membangun dan Melindungi TKI dari Desa*. (2017). Kementerian Ketenagakerjaan.
- Money Follows Program, Prinsip Baru untuk Prioritas Nasional 2017*. (2017). Kantor Staff Presiden.
- Muhammad, I. A. (2018). *Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maros)*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ningsih. (2018). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Konsep Money Follow Program Dalam Perencanaan dan Penganggaran Kota Padang. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 13(1), 1–16.
- Novia, N. P. (2020). *Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada RSUD Dr. H Koesnadi Bondowoso*. Universitas Jember.
- Pedoman Desa Migran Produktif*. (2017). Kementerian Ketenagakerjaan.
- Permenaker 2/2019, Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif*. (2019). <https://www.jogloabang.com/ekbis/permenaker-22019-pemberdayaan-komunitas-pekerja-migran-desa-migran-produktif>
- Wasono, A., & Muhammad, M. (2018). *Tinjauan Kritis Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Indonesia*.